

Kompetisi Badunsanak

FAISAL ZAINI DAHLAN

Dosen UIN Imam Bonjol Padang

PROSES Pilkada pada empat kota di Sumatera Barat telah sampai pada tahapan kampanye, tetapi hingar bingar upaya mendulang konsituen belum begitu terasa. Bisa jadi para kandidat dan tim sukses masih membaca dengan cermat arah politik dan peta kekuatan, sambil mematangkan langkah-langkah cerdas dan strategis. Harapan kita, fenomena adem ayem-ayem ini bukanlah signal akan anjloknya angka partisipasi politik masyarakat pada hari H Juni mendatang. Kita tidak saja khawatir munculnya apatisme publik terhadap proses politik, tetapi juga pragmatisme yang berujung pada tercederainya kualitas produk demokrasi. Lebih memperhatikan lagi tentunya, jika ternyata fenomena itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang semakin merosot terhadap penyelenggara negara.

Lain halnya manakala situasi adem ayem-ayem tersebut justru ekspresi telah dicapainya titik keseimbangan maupun kedewasaan berpolitik. Demikian pula jika suasana tanpa gejala ini ternyata indikasi terbangunnya budaya politik yang kondusif. Kita berharap dalam konteks Sumatera Barat, jargon Pilkada Badunsanak tidak saja menjadi mantra ampuh peredam konflik, tetapi wujud kesadaran konstruktif dari nilai kearifan lokal Minangkabau yang bermartabat, di tengah masih menguatnya intrik-intrik negatif dan destruktif.

Budaya Politik

Dalam konteks Pilkada Kota Padang 2013 lalu, Nursyirwan Efendi menulis "Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik Indonesia" pada Jurnal Masyarakat Indonesia (2014). Guru Besar Ilmu Antropologi UNAND ini menemukan, kondisi politik yang kondusif pada Pilkada Padang 2013

terbangun dari adanya rasa persaudaraan (*badunsanak*) di tengah masyarakat konsituen. Kontestasi yang diikuti sepuluh pasang calon waktu itu, berlangsung aman damai tanpa konflik yang berarti.

Menurut Nursyirwan meski kemajuan demokratisasi di Indonesia sudah luar biasa, namun menghadirkan ironi terkait besarnya biaya untuk mengongkosi prosesnya dibanding pendanaan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Demikian pula berbagai kekerasan masih jadi model konflik sosial yang mengiringi proses kontestasi di sejumlah wilayah. Inilah kondisi riil kesadaran politik publik dari sistem pemilihan langsung dengan keterlibatan aktif masyarakat menentukan pemimpinnya.

Pertanyaan penting dalam hal ini menurut Nursyirwan, kenapa Pilkada masih disertai konflik. Menurutnya, jawaban bisa diberikan dari perspektif kebudayaan. Rumusan politik kontemporer yang berlangsung di tanah air, menurutnya tidak berasal dari pemikiran politik asli masyarakat sendiri. Karena itu, diperlukan eksposisi tentang politik yang bersumber dari kebudayaan sendiri sebagai alternatif pemahaman dari eksistensi politik yang ada saat ini. Hal ini rasional, karena setiap kebudayaan bersifat kontekstual dan terbangun dari pandangan asli (*native point of view*) masyarakatnya sendiri. Menurutnya secara antropologis argumentasinya adalah, bahwa politik terikat (*embedded*) dalam kebudayaan.

Dalam konteks inilah Nursyirwan melihat fenomena Pilkada Badunsanak sebagai budaya politik menjiwai keseluruhan proses kontestasi yang secara umum berlangsung nirkonflik di wilayah ini. Mengutip Asrinaldi (2010), Nursyirwan menyebut bahwa fenomena Pilkada Badunsanak ini sebagai kesepakatan elite untuk berkomitmen siap menerima kekalahan sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi. Ini merupakan agenda politik elite dalam rangka membangun demokrasi lokal sekaligus pesta demokrasi yang aman dan damai.

Dari Minang untuk Indonesia Pilkada Badunsanak bisa disebut sebagai budaya politik asli berbasis budaya lokal Minangkabau. Istilah *badunsanak* menurut Nursyirwan memiliki dua konotasi, yakni pertama, mengandung arti persaudaraan dalam satu kaum (*lineage*) dan satu suku (*clan*). Semakin luas ikatan persaudaraan, maka hubungan semakin menjadi suatu kekerabatan semu (*fictive kinship*). Badunsanak pada tataran ini mengandung kekuatan hubungan kekerabatan semu, namun terikat pada nilai kekerabatan yang diakui bersama oleh kaum atau suku tersebut. Sedangkan konotasi kedua, memiliki makna berasal dari satu keturunan kerabat (*genealogis*).

Secara antropologis, menurut Nursyirwan, *badunsanak* dalam konteks Pilkada lebih berkonotasi ikatan persaudaraan semu ketimbang persaudaraan sejati. Artinya, jargon politik yang dikonstruksi para elite ini sengaja dibangun dan ke-

mudian dikendalikan untuk kepentingan politik praktis. Kekuatan makna yang dikandung jargon *badunsanak* ini terletak pada perasaan membayangkan (*imagined*) bahwa semua pelaku yang terlibat dalam kontestasi berasal dari suku Minangkabau. Karenanya, tidak rasional jika muncul konflik antar kandidat maupun pendukungnya, karena semua bersaudara. Tekad ini secara simbolis dibuktikan dengan ikrar para kandidat bersama unsur-unsur vital masyarakat. Meski begitu, mengutip Asrinaldi (2010), dalam konstruksi persaudaraan ini masih terdapat semangat kompetisi.

Gagasan *badunsanak* secara faktual terbukti efektif mengiringi terseleenggaranya Pilkada yang aman tanpa konflik horizontal. Karena itu, Nursyirwan (2014) mengapungkan gagasan ini untuk dijadikan model kontestasi di daerah lain dengan mengambil nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan yang dimiliki masyarakat, meski dalam pola berbeda. Di Maluku saat ini telah muncul jargon Pilkada Katong Orang Basudara sebagai kesepakatan untuk Pilkada damai (Malukupost.com, 16/02/18).

Kini jargon *badunsanak* kembali kita usung. Meski hiruk pikuk belum terdengar, namun kita tetap waspada terhadap segala potensi yang bisa menggerus persaudaraan itu. Hoax, fitnah, *black campaign*, pembunuhan karakter, ataupun penggiringan opini buruk hingga adu domba. Kontestasi dan kompetisi tentu harus dilakukan, namun di atas semua itu nilai-nilai *badunsanak* telah pula berabad-abad menjadi kekuatan dan roh pemersatu. Karenanya amat tragis jika warisan kearifan itu dikanggangi untuk kepentingan sesaat. *Wallahua'lam.*(*)